



Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Program Kesetaraan Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Gorontalo

Halim K. Malik¹, Nurain Karnain²

¹*Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia*

² *Universitas Negeri Gorontalo Indonesia*



E-mail: halim_malik@ung.ac.id¹

nurainkarnain@ung.ac.id²

Artikel Info	Abstrak
Diterima 18 September 2025 Direvisi 27 Oktober 2025 Diterbitkan 16 Desember 2025	<p>Pengembangan kurikulum dalam pendidikan nonformal merupakan aspek fundamental dalam menjamin tercapainya layanan pendidikan yang relevan, kontekstual, dan adaptif bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk menganalisis implementasi kurikulum di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Gorontalo, khususnya pada program kesetaraan Paket C. Hasil analisis sangat penting untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dan implementasinya apakah sudah berjalan secara optimal. Disamping itu dapat mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat baik dari sisi warga belajar, pamong, sarana dan prasarana serta manajemen SKB. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pamong belajar dan peserta didik, serta telaah dokumen. Penelitian ini dilaksanakan di semester ganjil tahun ajaran 2025/2026. Informan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang terdiri dari 5 orang pamong Belajar dan 15 orang warga belajar. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka telah diterapkan, namun implementasinya masih terbatas pada pembelajaran di kelas formal, sedangkan pembelajaran di luar sekolah masih mengandalkan modul. Tantangan utama meliputi keterbatasan fasilitas, ketidakstabilan kehadiran peserta didik, serta minimnya bimbingan teknis bagi pamong belajar. Meskipun demikian, SKB menyediakan layanan pendidikan inklusif bagi masyarakat beragam latar belakang, termasuk warga belajar dewasa dan mereka yang bekerja. Hasil ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi pamong dalam merancang pembelajaran, penguatan pendekatan pembelajaran yang fleksibel, mendorong pamong dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kurikulum merdeka. Artikel ini merekomendasikan perlunya peningkatan sarana pembelajaran, pelatihan pamong, serta revitalisasi program vokasi agar kurikulum benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.</p> <p>Kata kunci: pendidikan masyarakat; implementasi kurikulum; skb; kesetaraan; pamong belajar</p>

Dipublikasikan oleh: Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm>

DOI: <https://doi.org/10.32332/dedikasi.v7i2.12150>

P-ISSN [2686-3839](#) dan E-ISSN [2686-4347](#)

Volume 7 Nomor 2, Juni-Desember 2025

Tulisan ini bersifat akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



Pendahuluan

Kurikulum merupakan salah satu komponen fundamental dalam sistem pendidikan, baik formal maupun nonformal, tanpa kurikulum yang terarah penyelenggaraan pendidikan akan kehilangan pijakan dalam menentukan tujuan dan strategi pembelajaran. Oleh karena itu, kurikulum harus dirancang secara adaptif agar mampu menjawab dinamika sosial, ekonomi, serta karakteristik peserta didik yang terus berkembang. Pembelajaran pada satuan nonformal lebih fleksibel dan dapat terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti kursus atau pelatihan. Pengembangan kurikulum yang relevan dan penilaian berbasis kompetensi merupakan strategi yang efektif dalam pembelajaran nonformal. Rajaminsah, et al. (2024) mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum yang relevan dapat membantu memenuhi kebutuhan dan minat siswa secara lebih baik. Kelima, penilaian berbasis kompetensi dapat memberikan pandangan yang holistik mengenai kemampuan siswa. Dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran nonformal ini, mutu pembelajaran dapat meningkat secara signifikan.

Dalam dunia pendidikan, kurikulum dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit kurikulum diartikan hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik disekolah atau diperguruan tinggi (Wahyuni, 2015). Selain itu menurut Sari (2022: 2) kurikulum merupakan bagian terpenting dalam proses pendidikan karena kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan suatu pendidikan dan kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Lebih lanjut Salam & Aneta (2020: 3) mengemukakan bahwa kurikulum dan model pembelajaran pendidikan kesetaraan sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan dari konteks kehidupan masyarakat daerah dan lokal. Oleh karenanya menuntut kemampuan pamong belajar untuk mengembangkan program, menyusun kurikulum, dan mengembangkan model pembelajaran yang beraneka ragam sesuai dengan konteks kehidupan sosial budayanya. Indonesia dalam penerapan kebijakan kurikulum termasuk Kurikulum Merdeka di pendidikan non-formal menyediakan layanan pendidikan yang setara dan dikelola oleh masyarakat (Latif, et al. 2024; 1).

Pada program pendidikan kesetaraan Paket C materi yang diberikan disesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh SPNF SKB, yaitu Kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan 11 dan untuk kelas 12 menggunakan kurikulum K-13. Materi pembelajaran dibuat berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan menjadi perangkat pembelajaran seperti ATP, silabus, RPP, dan LKPD. Sumber belajar yang digunakan untuk materi pembelajaran bersumber pada modul, ebook, youtube dan melalui internet, (Dadan, et al. 2024: 495). Kurikulum dan rencana pembelajaran harus memberi peluang dan dampak kesempatan bagi warga belajar untuk mengekspresikan kreativitas dan mengembangkan kemampuan secara mandiri sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya (Siahaan, et al. 2022).

Satuan Pendidikan Non Formal, khususnya SKB telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam kegiatan belajar mengajarnya. SKB menyediakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, termasuk *life-skill* dan kewirausahaan (Utami et al., 2024). Implementasi kurikulum memerlukan penyusunan proyek-proyek praktis yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, seperti pemberdayaan, keterampilan, pelatihan kerja, kewirausahaan, dan kegiatan berbasis masyarakat. Meskipun demikian, tantangan besar muncul dari keterbatasan sumber daya dan tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi khusus dalam mengembangkan kurikulum karena terkendala sarana pendukung lainnya. Saat ini, penerapan Kurikulum Merdeka semakin berkembang di berbagai sekolah sebagai respons terhadap tantangan pemulihan pembelajaran, yang juga diatur dalam Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 262/M/2022. Kemudian disempurnakan menjadi Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, (Nafiurrohman & Ilyas, 2024).

Berdasarkan beberapa pandangan dan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik, tetapi juga merupakan perangkat penting yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Kurikulum menjadi alat strategis untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar agar selaras dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkelanjutan agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika masyarakat. Pengembangan kurikulum diperlukan untuk memastikan bahwa proses pendidikan tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hasil belajar serta pemberdayaan peserta didik dalam kehidupan nyata.

Menurut Prasetya (2020) pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks, dan melibatkan semua komponen yang saling terkait dan mendukung antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Kurikulum sifatnya dinamis, harus selalu diadakan pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Pengembangan kurikulum harus dilakukan secara sistematis dan terarah, harus memiliki visi dan misi yang jelas, mau dibawa kemana pendidikan nasional ke depan dengan pengembangan kurikulum tersebut. Dalam pendidikan masyarakat, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai acuan pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup warga belajar. Kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, relevan dengan karakteristik peserta didik, serta fleksibel terhadap dinamika sosial dan ekonomi.

Lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan merupakan salah satu lembaga pemerintah, yang memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan pelayanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal kepada masyarakat yang bermasalah pada jalur Pendidikan formal (Achmad, 2023). Sebagai unit pelaksana teknis dibawah Dinas Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berfungsi menyediakan berbagai program pembelajaran yang fleksibel, terjangkau, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan kesetaraan hingga pelatihan keterampilan. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai lembaga pendidikan nonformal memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan masyarakat lainnya. SKB Kota Gorontalo menjadi salah satu UPT yang menjalankan fungsi ini melalui berbagai kegiatan yang bertujuan memberikan layanan pendidikan inklusif bagi masyarakat lintas usia, latar belakang sosial ekonomi, dan kondisi pekerjaan. Dalam konteks ini, pengembangan kurikulum menjadi kebutuhan mendesak agar program yang dijalankan dapat benar-benar menjawab tuntutan masyarakat dan memberikan manfaat secara langsung.

Implementasi Kurikulum Merdeka pada program kesetaraan di SKB Kota Gorontalo menunjukkan adanya upaya peningkatan mutu pembelajaran. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan pelatihan bagi pamong belajar, minimnya bimbingan teknis, keterbatasan fasilitas pembelajaran, serta heterogenitas peserta didik. Kondisi peserta didik yang beragam, mencakup pekerja, ibu rumah tangga, peserta didik dewasa hingga lanjut usia, hingga mereka yang memiliki permasalahan sosial seperti *brokenhome* atau ketertinggalan di sekolah formal, menuntut adanya kurikulum yang fleksibel dan responsif. Pada sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan nonformal sangat tinggi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan formal karena keterbatasan biaya, waktu, maupun kondisi sosial. Program kesetaraan yang diselenggarakan SKB menjadi alternatif strategis yang membuat pendidikan lebih mudah dijangkau. Selain itu, SKB merupakan lembaga pendidikan yang memiliki fungsi mencakup penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C), program keaksaraan fungsional, pelatihan keterampilan, layanan kursus, pengelolaan taman baca masyarakat, serta program-program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas (Permana, 2025).

Disamping itu, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) juga terus menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga, seperti Puskesmas dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok khusus. Hal ini semakin menegaskan bahwa pengembangan kurikulum di SKB harus mempertimbangkan keberagaman kebutuhan warga belajar dan tuntutan kontekstual lapangan. Melalui kegiatan pengabdian ini, dilakukan analisis mendalam terkait pelaksanaan kurikulum di SKB Kota Gorontalo, khususnya pada program kesetaraan Paket C. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pamong belajar merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum; bagaimana peserta didik merespons pembelajaran; serta sejauh mana sumber belajar dan fasilitas pendukung mampu menunjang implementasi kurikulum. Di samping itu kegiatan pengabdian bertujuan untuk (1) menganalisis kesenjangan implementasi Kurikulum Merdeka di SKB Kota Gorontalo, (2) mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi pamong belajar di SKB Kota Gorontalo, dan (3) merumuskan strategi pengembangan kurikulum berbasis masyarakat di SKB Kota Gorontalo. Pendahuluan ini sekaligus menjadi dasar argumentatif pentingnya pelatihan pengembangan kurikulum bagi pamong belajar agar mereka memiliki kompetensi profesional dalam merancang pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat dan karakteristik peserta didik.

Dengan demikian, implementasi kurikulum di SKB Kota Gorontalo tidak hanya menjadi kebutuhan internal lembaga, tetapi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan relevansi, mutu, dan keberlanjutan pendidikan masyarakat. Artikel ini menjadi dokumentasi dan refleksi pengabdian terkait bagaimana pengembangan kurikulum dapat dioptimalkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan nonformal di daerah.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses implementasi kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran di SKB Kota Gorontalo. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk menggali secara komprehensif realitas yang terjadi di lapangan, terutama terkait peran pamong belajar, karakteristik peserta didik, serta dinamika pelaksanaan kurikulum dalam konteks pendidikan nonformal. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 7 dan 14 Oktober 2025 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Gorontalo. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: persiapan, observasi lapangan, wawancara, telaah dokumen, serta analisis temuan.

Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi koordinasi awal dengan pihak SKB Kota Gorontalo, penyusunan instrumen observasi, dan penentuan aspek-aspek yang akan dikaji. Aspek tersebut mencakup profil lembaga, peran pamong belajar, proses pembelajaran, ketersediaan sumber belajar, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum.

Tahap kedua yaitu observasi langsung, dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran yang berlangsung di SKB Kota Gorontalo. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana pamong menerapkan Kurikulum Merdeka, bagaimana interaksi antara pamong dan peserta didik, serta bagaimana sarana dan sumber belajar digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Observasi ini juga bertujuan untuk memahami kondisi nyata warga belajar yang memiliki latar belakang beragam, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, hingga peserta didik lanjut usia. Penelitian ini melibatkan 20 informan yang terdiri dari 15 pamong belajar dan 5 warga belajar yang ditentukan atau dipilih menggunakan *purposive random sampling*.

Metode ini bertujuan mendapatkan informan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi Kurikulum Merdeka. Jumlah informan sudah memenuhi syarat dan kebutuhan informasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Patton (2002), bahwa pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti, yaitu memilih kasus

yang informatif (*information-rich cases*) berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumber daya studi. Pemilihan informan dengan menambahkan atribut tertentu untuk mendapatkan jumlah informan yang diharapkan. Hal ini dilakukan ketika peneliti berhadapan dengan jumlah informan yang banyak agar dapat mengurangi bias informasi. Namun demikian jenis sampling tidak bertujuan untuk generalisasi dan keterwakilan informan.

Tahap ketiga adalah wawancara mendalam dengan pamong belajar dan peserta didik. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan panduan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi mengenai pengalaman pamong dalam mengajar, tantangan yang dihadapi, strategi pembelajaran yang digunakan, serta harapan mereka terhadap pengembangan kurikulum. Wawancara dengan peserta didik memberikan gambaran nyata mengenai motivasi mereka mengikuti program kesetaraan, pengalaman belajar, hambatan pribadi, serta pandangan mereka terhadap pembelajaran di SKB. Informasi ini menjadi data penting dalam memahami relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mendapatkan hasil penelitian lebih terarah dan informasi yang dibutuhkan, peneliti menyusun instrumen penelitian yang dijadikan acuan terhadap informasi implementasi kurikulum di SKB Kota Gorontalo.

Teknik yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, insentif dan mendalam. Wawancara jenis ini lebih terbuka, sehingga memperoleh data yang lebih kompleks dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Indikator-indikator penting yang selanjutnya dijabarkan dalam butir pertanyaan untuk pengelola dan pamong belajar adalah sebagai berikut (1) Pemahaman kurikulum merdeka tentang pengetahuan, konsep, tujuan untuk kurikulum merdeka untuk pendidikan kesetaraan; (2) Perencanaan dan implementasi kurikulum, adaptasi dan perumusan strategi, serta tantangan yang ada; (3) Pelaksanaan strategi pembelajaran Kurikulum Merdeka di Paket C; (3) Sumber daya sarana dan prasarana dan tutor tentang bagaimana kondisi dan sejauh mana efektivitasnya; (4) Perencanaan pembelajaran terkait penyusunan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka dalam proyek P5; (5) Pelaksanaan pembelajaran, “metode, diferensiasi dan peran pamong Belajar” tentang bagaimana strategi dalam pembelajaran Paket C dan bagaimana menangani keragaman latar belakang Warga Belajar; (6) Asesmen “diagnosis, formatif, sumatif” tentang bagaimana menerapkan asesmen serta tantangan yang sering terjadi; (7) Dukungan dan hambatan “sarana, supervise dan motivasi” tentang dukungan yang didapat dari SKB, apa tantangan teknis dan non teknis yang dihadapi; (8) Dampak “perubahan warga belajar” tentang perubahan pada peserta didik sejak kurikulum diterapkan.

Untuk Warga Belajar yaitu, (1) Pengalaman belajar tentang kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya; (2) Proses pembelajaran “metode, interaksi dan minat” tentang apa metode dan proses pembelajaran sesuai kebutuhan; (3) Proyek P5 “keterlibatan dan manfaat” tentang pengalaman yang didapatkan; (4) Asesmen apakah membantu perkembangan belajar Warga Belajar; (5) Kendala “kesulitan akademik dan non akademik” tentang tantangan dalam pembelajaran; (6) Harapan “saran dan perbaikan” tentang harapan pembelajaran agar lebih baik.

Tahap keempat yaitu telaah dokumen, meliputi pengumpulan dan pemeriksaan dokumen yang digunakan dalam pembelajaran seperti modul pembelajaran Paket C, jadwal belajar, rekaman data peserta didik, serta profil lembaga. Telaah dokumen membantu memperkuat data hasil observasi dan wawancara, serta memberikan gambaran mengenai struktur kurikulum yang diterapkan.

Seluruh data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif naratif. Data dikategorikan berdasarkan tema utama seperti implementasi kurikulum, kondisi peserta didik, sumber belajar, dan hambatan pembelajaran. Analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun gambaran utuh mengenai pelaksanaan pengembangan kurikulum di SKB serta merumuskan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan pembelajaran. Melalui metode pelaksanaan yang sistematis dan terarah, kegiatan pengabdian ini mampu memberikan

gambaran menyeluruh mengenai kondisi pembelajaran di SKB Kota Gorontalo, sekaligus menjadi dasar bagi upaya perbaikan kurikulum dan peningkatan kompetensi pamong belajar di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Data gambaran komprehensif pelaksanaan pengembangan kurikulum di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Gorontalo diperoleh dengan observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Data tersebut kemudian diolah dan disajikan secara naratif sehingga mendeskripsikan kondisi nyata implementasi kurikulum dan dinamika pembelajaran di lapangan (Tabel 1). Hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi kurikulum dalam pendidikan masyarakat berjalan dengan dinamika yang kompleks.

Tabel 1. Profil Informan Pamong Belajar dan warga Belajar Paket C

No.	Nama	L/P	Umur	Keterangan
1.	Sri Sofyawati Toma, SS	P	43 Th.	Pamong
2	Ciko J. Lelengboto, S.Pd	P	58 Th.	Pamong
3	Riton K. Abdul, S.Pd	L	55 Th.	Pamong
4	Yanti Eksan, S.Pd	P	42 Th.	Pamong
5	Bambang Rahim, S.Pd	L	55 Th.	Pamong
6	Suaib K. Huruse	L	21 Th.	warga belajar
7	Suleman Aliwu	L	22 Th.	warga belajar
8	Sapriyanto Ahmad	L	23 Th.	warga belajar
9	Riyanto husain	L	35 Th.	warga belajar
10	Taufik Hamzah	L	27 Th.	warga belajar
11	Yusuf Yunus	L	19 Th.	warga belajar
12	Zulkarnain Duu	L	24 Th.	warga belajar
13	Nia R. Lamusu	P	20 Th.	warga belajar
14	Novarianti Baraja	P	22 Th.	warga belajar
15	Nurain Hamad	P	30 Th.	warga belajar
16	Nurlindawati Pakaya	P	19 Th.	warga belajar
17	Reka Lihawa	P	28 Th.	warga belajar
18	Srikit Zahwa Taib	P	19 Th.	warga belajar
19	Vina Katili	P	18 Th.	warga belajar
20.	Yuli Ibrahim	P	26 Th.	warga belajar

Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan pamong belajar dan peserta didik sebagai informan kunci. Informasi dari kedua kelompok ini dianggap penting karena pamong berperan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, sedangkan peserta didik merupakan penerima layanan yang dapat memberikan perspektif autentik terkait pengalaman belajar mereka. Berikut disajikan tabel yang memuat profil dan jumlah informan yang terlibat, sehingga pembaca dapat memahami konteks karakteristik subjek penelitian secara lebih jelas dan terstruktur.

Pamong belajar dan warga belajar sebagai informan utama, dipilih karena memiliki posisi strategis dalam memberikan informasi terkait proses pembelajaran, tantangan implementasi, serta kesiapan lembaga dalam menerapkan kurikulum. Data dari informan tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun pemetaan (*mapping*) antara standar implementasi Kurikulum Merdeka dan kondisi aktual di lapangan (Gambar 1). Tabel berikut disajikan untuk memperlihatkan profil informan serta memudahkan pembaca dalam memahami konteks temuan penelitian secara lebih komprehensif.

**Tabel Mapping Implementasi Kurikulum Merdeka vs Kondisi Aktual
di SKB Kota Gorontalo**

Komponen Kurikulum Merdeka	Standar Implementasi	Kondisi Aktual di SKB	Catatan / Implikasi
Peran Pamong Belajar	Pamong menjadi fasilitator, mendorong pembelajaran diferensiasi dan berbasis proyek	Mayoritas pamong masih mengajar secara konvensional; adaptasi metode masih terbatas	Perlu pelatihan pedagogi dan PBL
Penyusunan Modul Ajar	Modul ajar fleksibel, kontekstual, dan berbasis kebutuhan peserta	Modul masih umum, belum sepenuhnya adaptif terhadap profil peserta Paket C	Pengembangan modul perlu berbasis asesmen diagnostik
Literasi Digital Pamong	Pamong menguasai LMS, media digital, dan evaluasi berbasis teknologi	Penguasaan TIK bervariasi; beberapa masih kesulitan menggunakan platform pembelajaran	Penguatan literasi digital menjadi prioritas
Manajemen Pembelajaran SKB	Jadwal fleksibel, blended learning dimungkinkan	Penggunaan pembelajaran digital masih minim	Perlu dukungan perangkat & internet
KOSP	KOSP disusun mengacu pada KM, P5, dan kebutuhan warga belajar	Sebagian SKB belum memperbarui KOSP	Perlu pendampingan penyusunan KOSP
P5 Kesetaraan	Projek kontekstual sesuai kebutuhan lokal	Belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya	Perlu panduan P5 yang lebih sederhana & pelatihan
Evaluasi / Asesmen	Dilakukan diagnostik, formatif, sumatif berbasis kompetensi	Evaluasi masih dominan sumatif	Pelatihan asesmen diperlukan
Fasilitas Pembelajaran	Tersedia ruang belajar, internet, media digital	Fasilitas TIK dan internet terbatas	Perlu dukungan anggaran & kemitraan
Dukungan Dinas Pendidikan	Pembinaan rutin, pelatihan, monitoring	Pembinaan belum konsisten dan belum spesifik KM Kesetaraan	Diperlukan pendampingan khusus kesetaraan

Gambar 1. Pemetaan (*mapping*) antara standar implementasi Kurikulum Merdeka dan kondisi aktual di lapangan.

Diperlukan visualisasi yang dapat menggambarkan hubungan antar faktor secara lebih ringkas dan terstruktur terhadap berbagai tantangan implementasi kurikulum di SKB. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari aspek pedagogis, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan pamong, keterbatasan fasilitas, manajemen pembelajaran, serta dukungan kelembagaan. Skema berikut dibuat untuk memetakan tantangan-tantangan utama yang dihadapi agar menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran (Gambar 2).

Pertama, SKB Kota Gorontalo telah menerapkan Kurikulum Merdeka pada program kesetaraan Paket C selama dua tahun terakhir. Namun, penerapan tersebut belum berjalan secara optimal, terutama untuk warga belajar yang mengikuti pembelajaran di luar kelas formal. Pada kelas-kelas kelurahan, pembelajaran masih mengandalkan modul, disebabkan keterbatasan fasilitas dan beragamnya kondisi peserta didik. Hal ini diperkuat oleh salah satu pamong yang menyatakan bahwa: “*Penerapan kurikulum merdeka belajar di SKB Kota Gorontalo sudah diterapkan sejak 2 tahun terakhir, akan tetapi selama ini di SKB Kota Gorontalo merasa sangat kurang dalam hal Bimbingan Teknis atau Bimtek dengan berbagai aktifitas yang ada di SKB dibandingkan dengan aktifitas yang ada di sekolah Formal, Bimtek yang sering dilakukan di SKB hanya terhitung 1 tahun sekali atau paling tidak 6 bulan sekali*

dibandingkan dengan sekolah-sekolah formal yang kurang lebih hampir sebulan atau 2 bulan sekali dalam melaksanakan bimtek” (Pamong SST, ww. 07-10-25).



Gambar 2. Hubungan antar faktor mengenai berbagai tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di SKB

Di samping itu jangkauan akses ke kelas-kelas yang ada di luar SKB menjadi kendala tersendiri. Kurang optimalnya implementasi kurikulum berkaitan dengan akses sebagaimana diperoleh dari hasil wawancara dengan pamong lainnya. *“Kurikulum merdeka belajar sudah diterapkan di SKB, hanya saja masih belum terlalu sering, di luar SKB banyak warga belajar yang tersebar di 50 Kelurahan yang ada di Kota Gorontalo yang usianya sangat beragam”* (Pamong, RKA, ww. 07-10-25).

Kedua, pamong belajar memiliki peran kunci dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan wawancara, pamong belajar yang diwawancarai memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan pengalaman mengajar yang cukup, tetapi mengakui masih minimnya pelatihan (bimtek) tentang pembaruan kurikulum. Bimtek hanya dilaksanakan 1–2 kali dalam setahun, jauh lebih sedikit dibanding lembaga formal. Salah satu pamong yang ada di SKB Kota Gorontalo menuturkan bahwa: *“Peran guru pamong adalah sebagai pelaksana sekaligus sebagai fasilitator pembelajaran kesetaraan Paket C kelas 10 dan kelas 11, menyusun rencana belajar, menyediakan modul, dan memastikan asesmen berjalan baik, membantu mereka mengatasi kesulitan belajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Akan tetapi ada hambatan terutama belum semua ruangan terjangkau koneksi internet, dan koneksi sering tidak stabil, oleh karena itu proses belajar mengajar juga sering tidak maksimal.”* (pamong B.R, ww. 14-10-25). Pernyataan tersebut dianggap sebagai keluhan bukan hanya pada warga Belajar, tetapi juga oleh pamong. Informasi ini didapat melalui wawancara dengan salah satu pamong, yang mengatakan bahwa *“Koneksi internet sering tidak stabil bahkan mati, dan hanya ada beberapa ruangan tertentu yang koneksinya stabil, misalnya gedung dewan guru dan sekitarnya.”* (pamong SST, ww. 07-10-25).

Ketiga, warga belajar di SKB memiliki latar belakang yang sangat heterogen. Warga belajar terdiri dari mereka yang bekerja sebagai buruh pasar, ibu rumah tangga, peserta didik yang tertinggal di sekolah formal karena sakit, hingga warga usia lanjut yang tetap ingin menyelesaikan pendidikan. Kondisi ini menyebabkan kehadiran peserta didik sering tidak stabil, sehingga pamong perlu menyesuaikan strategi pembelajaran. Keberagaman usia dan latar belakang warga belajar menjadi salah satu aspek kurang optimalnya implementasi kurikulum di SKB, maupun di unit-unit yang tersebar di 50 kelurahan di Kota Gorontalo. Penyebab utamanya adalah unfleksibilitas. Menurut pemahaman salah satu pamong, *“Bahwa kendala yang sering di hadapai oleh pamong adalah latar belakang warga belajar yang memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk menentukan waktu Belajar yang efektif.”*

Untuk mengatasi ini warga belajar sudah disediakan modul serta materi yang disediakan melalui media *whats-App*, (pamong, YE, ww. 07-10-25). Hal ini dibenarkan oleh salah satu warga belajar bahwa: *“Pembelajaran di SKB bisa dipahami dengan mudah, akan tetapi kendalanya adalah sekolah sambal kerja, karena waktu belajar sering terbagi dengan waktu bekerja, tetapi saya sangat ingin memperoleh ijazah kesetaraan.”* (WB. NH, ww. 14-10-25). Ungkapan ini berbeda dengan pernyataan warga belajar lainnya, bahwa *“Belajar di SKB yang fleksibel sangat membantu dia melanjutkan kembali kembali sekolah yang tertunda, karena warga belajar tersebut adalah korban brokenhome.”* (WB. NRL. Ww.14-10-25).

Keempat, dari sisi sumber belajar, SKB menggunakan modul Paket C (Modul 1–15) sebagai bahan ajar utama. Modul tersebut diakses melalui tautan digital untuk mempermudah peserta didik yang belajar di rumah. Namun, kendala internet dan keterbatasan penggunaan LCD di beberapa kelas menjadi hambatan dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa sarana pendukung untuk optimalisasi implementasi kurikulum merdeka sedikit mengalami kendala. Menurut salah seorang pamong, bahwa: *“Modul ajar sebagian masih menggunakan modul yang sudah ada yang sudah tidak relevan dengan revisi terbaru tahun 2025 sehingga kurang mengintegrasikan profil pemuda pancasila.”* (pamong SST. ww. 07-10-25).

Kelima, SKB juga menyelenggarakan berbagai keterampilan seperti kecantikan, silat, dan pelatihan dasar lain. Kegiatan ini membantu peserta didik mengembangkan potensi praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, program vokasi besar yang sebelumnya sukses, seperti sulam karawo dan memasak, kini tidak berjalan karena keterbatasan anggaran dan proposal program. Menurut hasil wawancara, diperoleh bahwa: *lifeskill kecantikan dll. sudah selesai dan belum dibuka kembali karena dana untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut bersifat proyek.* Pamong, RKA. ww. 07=10-25).

Keseluruhan hasil menunjukkan bahwa SKB Kota Gorontalo telah berupaya mengembangkan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural dalam implementasinya. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SKB berjalan melalui proses adaptasi yang cukup kompleks. Kompleksitas tersebut terutama dipengaruhi oleh kondisi peserta didik yang heterogen, ketersediaan sarana pembelajaran yang terbatas, serta minimnya pelatihan bagi pamong belajar sebagai pelaksana kurikulum.

Implementasi kurikulum di SKB tidak hanya dipengaruhi oleh desain kurikulum itu sendiri, tetapi juga bergantung pada faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal ini terlihat dari keberagaman kondisi warga belajar yang mencakup pekerja informal, ibu rumah tangga, peserta didik dengan riwayat ketertinggalan belajar, hingga warga lanjut usia. Situasi ini memengaruhi pola kehadiran peserta didik dan menuntut pamong belajar untuk menerapkan strategi pembelajaran yang lebih fleksibel, seperti penggunaan modul dan pembelajaran mandiri. Temuan terdahulu menjelaskan praktik belajar mandiri di Satuan Pendidikan Nonformal sudah ada sejak lama, keistimewaan tersebut

adalah kenyataan bahwa kesempatan belajar diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan asas kemudahan dan fleksibilitas waktu belajar. Terlebih lagi penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sudah lama dipraktikkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya modul pembelajaran cetak dan elektronik yang dapat diakses secara terbuka kapan pun dan dimana pun (Yani, 2023). Kurikulum Merdeka memiliki tujuan mulia untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif. Pencapaian tujuan kurikulum ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, tutor, guru, orang tua, dan masyarakat (Salsabila, 2024: 4).

Di samping itu hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SKB telah menyediakan modul resmi Paket C sebagai sumber belajar utama, pemanfaatan teknologi pembelajaran masih terbatas akibat persoalan jaringan internet dan ketersediaan perangkat LCD. Hal ini menyebabkan implementasi Kurikulum Merdeka yang menuntut pembelajaran berbasis proyek dan pemanfaatan media digital belum dapat dilakukan secara optimal. Minimnya bimbingan teknis juga menjadi hambatan struktural yang memengaruhi kesiapan pamong dalam memahami dan menerapkan berbagai bagian dari Kurikulum Merdeka. Kondisi ini berimplikasi pada ketidaksinkronan antara tuntutan kurikulum dengan kemampuan teknis pamong dalam mengelola pembelajaran yang inovatif dan adaptif. Hal ini sejalan dengan temuan yang menjelaskan bahwa sangat dibutuhkan kompetensi profesional pamong untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran, pamong belajar bertanggung jawab untuk mengarahkan warga belajar ke kegiatan belajar dengan kompetensi yang dimilikinya (Achmad, 2023).

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kurikulum ideal yang diharapkan pemerintah dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting bagi pembahasan yang lebih mendalam mengenai kesesuaian kurikulum, relevansi strategi pembelajaran, serta kebutuhan perbaikan dalam implementasi.

Implikasi Praktis

Implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan nonformal seperti SKB menuntut adanya penyesuaian dalam berbagai aspek pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum ini tidak hanya mengubah pendekatan belajar-mengajar, tetapi juga menuntut peningkatan kompetensi pamong, kesiapan manajerial lembaga, serta dukungan kebijakan dari dinas pendidikan. Dengan demikian, analisis implikasi praktis menjadi penting untuk memastikan setiap pemangku kepentingan memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Alinea berikut menguraikan implikasi tersebut secara lebih terarah dan komprehensif,

1. Implikasi praktis untuk pamong Belajar di SKB Kota Gorontalo antara lain: (a) Pamong belajar adalah pendidik utama di SKB, sehingga Kurikulum Merdeka membawa perubahan besar pada cara mereka merancang dan melaksanakan pembelajaran, pamong harus mampu berperan sebagai fasilitator, mentor dan pendamping proses belajar berbasis kebutuhan peserta didik; (b) Pamong harus mampu menyusun modul ajar yang fleksibel, merancang *project based learning* serta membuat *assessment diagnostic* sederhana; (c) Peningkatan kompetensi literasi digital, di antaranya harus menguasai penggunaan LMS sederhana, menguasai media digital, dan evaluasi berbasis teknologi; (d) Menerapkan pembelajaran kontekstual, serta mengaitkan materi ajar dengan profesi warga belajar, kebutuhan masyarakat lokal dan pengalaman kerja warga belajar.
2. Implikasi praktis untuk pengelola SKB Kota Gorontalo antara lain: (a) Pengelola SKB memiliki peran memastikan implementasi Kurikulum Merdeka berjalan sistematis, dengan menyiapkan system manajemen pembelajaran, misalnya menyediakan jadwal fleksibel, memfasilitasi ruang belajar, menyediakan akses internet dengan perangkat memadai; (b) Penguatan manajemen kesetaraan; (c) Menyediakan program pelatihan pamong; (d) Menggandeng kemitraan dengan

dunia usaha dan komunitas untuk proyek pembejaraan dan praktik kerja dan penguatan sistem evaluasi program kesetaraan secara berkala.

3. Implikasi praktis untuk Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, antara lain: (a) Menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk kelancaran proses Belajar mengajar di SKB Kota Gorontalo secara komprehensif; (b) Menyusun panduan implementasi kurikulum merdeka dalam konteks lokal kedaerahan; (c) Pembinaan implementasi kurikulum merdeka serta melakukan pendampingan khusus untuk Program Paket C di SKB Kota Gorontalo; (d) Mendorong kolaborasi antar satuan Pendidikan baik SKB, PKBM maupun Pendidikan formal (kolaborasi modul ajar, asesmen, dan kegiatan P5BK).

Keterbatasan Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan penelitian dan pengabdian ini memiliki cakupan terbatas, karena hanya berfokus pada Program Paket C di satu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Gorontalo saja. Program Paket C sendiri adalah layanan pendidikan kesetaraan setara SMA untuk masyarakat yang tidak mengikuti sekolah formal. Karena penelitian hanya dilakukan di satu lokasi, maka: Hasil dan temuan dari kegiatan ini tidak dapat digeneralisasi atau tidak bisa dianggap mewakili seluruh SKB di wilayah lain, mengingat setiap SKB biasanya memiliki karakteristik peserta didik, fasilitas, tenaga pendidik, serta kondisi sosial yang berbeda-beda. Variasi konteks antar SKB tidak dianalisis, sehingga belum diketahui apakah metode, strategi, atau hasil pengabdian ini akan memberikan dampak yang sama ketika diterapkan pada SKB lain. Oleh karena itu, studi komparatif dengan beberapa SKB lain sangat diperlukan untuk: (1) membandingkan kondisi di berbagai SKB; (2) mengetahui apakah hasil pengabdian ini konsisten di tempat lain; (3) memperkuat validitas serta generalisasi temuan penelitian.

Saran Kegiatan Lanjutan

Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian pada masa mendatang, terdapat beberapa arah pengembangan yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengaji Efektivitas Model Pelatihan untuk Pamong Belajar
Pamong belajar adalah pendidik pada pendidikan nonformal yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi sejauh mana model pelatihan tertentu misalnya pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masalah (*problem-based training*), atau pelatihan berbasis proyek (*project-based training*) mampu meningkatkan keterampilan pamong belajar dalam mengajar Program Paket C. Hal ini penting karena kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan pamong dalam mengelola kelas, menggunakan media pembelajaran, dan menerapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
2. Mengembangkan Kurikulum Adaptif Berbasis Teknologi untuk Pendidikan Nonformal
Penelitian selanjutnya juga dapat fokus pada pembuatan atau pengembangan kurikulum adaptif berbasis teknologi, yaitu kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan memanfaatkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) seperti modul digital, platform belajar daring, aplikasi pembelajaran, atau media interaktif. urikulum adaptif seperti ini sangat relevan bagi pendidikan nonformal karena peserta didik Paket C biasanya memiliki latar belakang beragam, jadwal belajar tidak terstruktur, serta kebutuhan pembelajaran yang fleksibel. Melalui penelitian lanjutan, diharapkan kualitas layanan pendidikan nonformal, khususnya Program Paket C, dapat meningkat dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Gorontalo menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dalam pendidikan masyarakat merupakan proses yang bersifat adaptif, kontekstual, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial peserta didik serta kapasitas lembaga. Implementasi Kurikulum Merdeka pada program kesetaraan Paket C telah dilakukan, namun berjalan secara bertahap dan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait keterbatasan fasilitas pembelajaran, minimnya pelatihan bagi pamong belajar, serta heterogenitas warga belajar yang menyebabkan variasi kehadiran dan tingkat kesiapan belajar.

Hasil pengabdian memperlihatkan bahwa pamong belajar berperan penting sebagai fasilitator yang harus mampu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Penggunaan modul menjadi solusi utama dalam penyampaian materi, terutama bagi warga belajar yang mengikuti pembelajaran di luar kelas formal. Meskipun demikian, keterbatasan akses teknologi seperti internet dan LCD menghambat optimalisasi pendekatan pembelajaran yang inovatif sesuai tuntutan Kurikulum Merdeka.

Secara keseluruhan, pengembangan kurikulum di SKB Kota Gorontalo telah bermanfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses pendidikan bagi warga dari berbagai latar belakang. Namun, peningkatan kualitas implementasi kurikulum perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas pamong, perbaikan sarana pembelajaran, serta dukungan program keberlanjutan agar layanan pendidikan masyarakat semakin efektif, relevan, dan berdampak luas bagi peningkatan kualitas hidup warga belajar. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Gorontalo menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dalam pendidikan masyarakat merupakan proses yang bersifat adaptif, kontekstual, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial peserta didik serta kapasitas lembaga. Implementasi Kurikulum Merdeka pada program kesetaraan Paket C telah dilakukan, namun berjalan secara bertahap dan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait keterbatasan fasilitas pembelajaran, minimnya pelatihan bagi pamong belajar, serta heterogenitas warga belajar yang menyebabkan variasi kehadiran dan tingkat kesiapan belajar.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yang telah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pengabdian ini, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian ini.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Kontribusi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: HM bertanggung jawab atas perancangan dan pelaksanaan program pengabdian masyarakat serta melakukan pengumpulan dan analisis data. NK Menyusun data dan melakukan revisi dengan menambahkan analisis-analisis.

Referensi

- Abira Salsabila, (2024) How The Readiness Of Tutors And Learners In The Implementation Of The Independent Learning Curriculum, Proceeding International Conference on Learning Community (ICLC) Volume 1 No 1, 2024 1 (1) 4
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/iclc/index>
- Ahmad Yani, (2023). Peran Pendidikan NonFormal dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Pada Warga Belajar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 6 (1), 5
<https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform/article/view/1119/167>

- Dadan Darmawan, Tria Karlina, Syadeli Hanafi, (2024) Pelaksanaan Pembelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Serang, 9 (1) 495
<https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.2022>
- Evi Catur Sari, (2022). Kurikulum Di Indonesia: Tinjauan Perkembangan Kurikulum Pendidikan. *Inculco Journal of Chiristian Education*, 2 (2), 2
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3313014&val=29054&title>
- Fitri Wahyuni, (2025). Kurikulum Dari Masa Ke Masa. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 10 (2), 2
<https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/alabadiyah/article/view/2792>
- Gilang Permana, et al. (2025). Hambatan dalam Implementasi Program Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Nonformal di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Serang. *Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10 (2),
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/25062/13600>
- Ilmar Andi Achmad, et al. (2023). Kompetensi Profesional Pamong Belajar dalam Penyusunan Perencanaan Pembelajaran di Sanggar Kegiatan Belajar. *Journal Prodi Pendidikan Nonformal Universitas Muhammadiyah Parepare*, 1 (1), 4
<https://jurnal.umpar.ac.id/cls/article/view/2582/1746>
- Ilmar Andi Achmad, et al. (2023). Kompetensi Profesional Pamong Belajar dalam Penyusunan Perencanaan Pembelajaran di Sanggar Kegiatan Belajar. *Jurnal Prodi Pendidikan Nonformal Universitas Muhammadiyah Parepare*, 1 (1), 14
<https://jurnal.umpar.ac.id/cls/article/view/2582/1746>
- Indra Prasetya, (2020). Manajemen Pengembangan Kurikulum (Studi di Lab Site Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi*, 1 (1), 3
https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JMP-DMT/article/view/3953/pdf_8
- Nafiurommah, A., & Ilyas. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Program Pendidikan Kesetaraan. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5 (2), 805.
<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/nusra/article/view/2648>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3 ed.). California: Sage Publishing.
- Rajaminsah, Yuni Rahmawati, Yuliana Ambarwati³, Siti Nurjanah, (2024) Strategi Pembelajaran Nonformal dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran 7 (4) 1526
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1150>
- Ridwan Salam, Asna Aneta, (2020) Kompetensi Pamong Belajar Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Learning ompetitions In Public Service Development Coverage Packaging Training Education C 2 (2), 3
<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjpads/article/view/778>
- S Latief, Samsuddin, A Subhan (2024) Nonformal Education and Merdeka Curriculum Policy: The Leaders' Perspective 5 (1) 1
<https://scie-journal.com/index.php/SiLeT>
- Siahaan, A., Lubis, A. A., Sitorus, C. M., Fatimah, T., & Zebua, V. F. (2022). Evaluasi Kompetensi Guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 di MA Laboratorium UINSU Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (2), 11143–11150.
- Utami, N. N., Asalaka, M. B., Sulistyowati, R., Nugrahu, P. A., Sihombing, O. M., Sartica, D., Adie Sitinjak, A. J., & Timotius, F. A. (2024). Penguatan Keterampilan Andragogi Pada Satuan Pendidikan Non-formal (SPNF) Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pulang Pisau. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7, 962– 972. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/15257>